

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, cetakan ke-6, Kencana, Jakarta, 2010.
- Satrio, J, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Subekti, R dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Silondae, Arus Akbar, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Purnamasari, Irma Devita, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, 2010.
- Budiono, Herlien, *Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Thomas Suyatno, Chalik, Made Sukada, Tinon Yuniarti, Djurhaepah, *Dasar-dasar Perkreditian Edisi Kedua*, Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Thong, Tan Kie, 1994, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Aditya Bakti, Bandung, 2003

Internet :

www.hukumonline.com/pusatdata

[www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4588/akibathukumjaminan-fidusia- yang- belum-didaftarkan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4588/akibathukumjaminan-fidusia-yang-belum-didaftarkan)

[http://sp.beritasatu.com/home/pendaftaran-fidusia-online-pangkas-waktu-dan- biaya/37535](http://sp.beritasatu.com/home/pendaftaran-fidusia-online-pangkas-waktu-dan-biaya/37535)

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt552e024d7adda/ini-substansi-pp-pendaftaran-dan-biaya-pembuatan-jaminan-fidusia>

Peraturan Perundang-undangan :

Burgelijk Wetboek

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.PR.07.10 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.UM.01.10-11 Tahun 2001 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia.

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.UM.02.03-31 tanggal 8 Juli 2002 tentang Standarisasi Laporan Pendaftaran Fidusia dan Registrasi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.HT.01.10-22 Tahun 2005 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia.

